

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dan faktor penyebab terjadinya pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan prosedur berdasarkan analisis putusan mahkamah agung nomor-967K/Pdt/2010. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan adalah karena PPAT tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah, pembuatan akta PPAT tidak dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan tidak disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan. Dengan kasus mengenai pembuatan akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan prosedur maka perlu memperoleh Akibat hukum berupa : PPAT dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dan dikenakan sanksi administratif dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian serta Akta dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan atau peraturan-peraturan lain.

Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung, PPAT

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal consequences and causative factors which lead the construction of land sale and purchase deed was not in accordance with procedures based on analysis of the Supreme Court's decision number-967K/Pdt/2010. In this case it is known that the factor that cause the land dispute is due to PPAT did not pre-check at the Land Office regarding the suitability of land rights certificate, the construction of PPAT deed was not attended by the parties who carried out the concerned legal act and was not witnessed by at least two witnesses who, according to the provisions of prevailing regulations, and did not read the deed to the concerned parties. With regards to the case that the construction of land sale and purchase deed was not in accordance with related procedure, it is necessary to receive legal consequences in the form of: PPAT can be dishonorably dismissed from his position and subject to administrative sanctions without reducing the possibility of being sued for compensation by parties who suffer losses and resulted in the degradation of the power of proof becomes a private deed because it does not meet the requirements determined by law and or other regulations.

Keywords: Judicial Review, Supreme Court, PPAT